



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Rp 260 Juta, Jaksa Panggil Kades Nunggak Pajak

ARGA MAKMUR - Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (BU) terus melakukan upaya pengumpulan pajak yang tertunggak dan tidak masuk dalam kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemarin, tujuh dari 26 desa sudah hadir di Kejari BU untuk memenuhi undangan.

Tujuh desa yang sudah hadir kemarin masing-masing adalah Desa Talang Curup, Talang Baru Ginting, Talang Ginting, Pasar Palik, Talang Kering, Pagar Banyu dan Penyangkak.

25 desa ini dipanggil oleh JPN karena mereka masih tercatat belum membayar pajak DD 2021 maupun masih kekurangan bayar. Pemanggilan dilakukan hingga Rabu besok.

Kajari BU Pradhana Probo S. SE, SH, MH melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Akbar Pramadhana, SH menuturkan jika kemarin memang diagendakan tujuh kepala desa yang diundang terkait dengan pajak tersebut. Namun ada diantaranya yang hadir merupakan mantan kades yang sudah tidak lagi menjabat.

"Ada yang memang langsung datang mantan kepala desa, karena memang sudah menyadari hal ini merupakan bagian dari penagihan pajak," kata Akbar.

Ia menuturkan ada total 260 juta target pajak DD 2021 yang belum dibayar oleh 26 desa. Namun

hal itu baru berdasarkan asumsi pajak dan masih harus dilakukan sinkronisasi dengan pemanggilan tersebut termasuk menegcek bukti bayar.

"Sebagian besar desa memang sudah membayar, namun belum menyerahkan bukti. Dari bukti tersebut dilakukan penghitungan kembali oleh Bapenda, terjadi kekurangan bayar," ujarnya.

Selain meminta seluruh desa datang ke Bapenda untuk dilakukan penghitungan pajak, JPN juga memberikan waktu hingga Jumat mendatang bagi seluruh desa tersebut melakukan pelunasan pajak. Serta melaporkan bukti pelunasan dari Bapenda.

"Ada beberapa yang meminta waktu sampai dua bulan. Tentu

tidak bisa kita setujui, karena seharusnya pajak itu dibayarkan Desember tahun lalu paling lambat," terangnya.

Jika hingga Jumat mendatang tidak dilakukan pemanggilan, maka Jaksa akan kembali melakukan pemanggilan kedua. Sekaligus meminta data pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran pajak.

"Karena sudah jelas dalam pelaksanaan kegiatan DD ada kegiatan yang wajib dilakukan pembayaran pajak. Sehingga kita berharap desa-desa bisa mematuhi hal tersebut sehingga juga bisa meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah," imbuh Akbar. (qia)